



**PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT**

RENCANA KERJA RENJA 2025

*Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat*



Jl. Tulip No. 2 Way
Mengaku Liwa



Telp. (0728) 21164
Fax (0728) 21164



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang merupakan implementasi tahunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja perangkat daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Liwa, Januari 2024

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematikan Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	10
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	15
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	16
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
4.1. Rencana Kerja	23
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.....	28
BAB V PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis PD. Renja-PD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Renja-PD merupakan dokumen rencana pembangunan PD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2023 – 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan perubahan regulasi serta dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Kabupaten Lampung Barat. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah, Namun pada sisi lain sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan.

Permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat seperti :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati, suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik akan meningkat sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

Terkait isu-isu strategis tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA)-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
13. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun berdasarkan pada penjabaran program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai dokumen perencanaan yang bersumber dari berbagai aspirasi yang ada.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
2. Untuk menterjemahkan perencanaan strategis 4 (empat) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renja ini adalah :

- a. Menetapkan program dan kegiatan organisasi yang sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, agar kegiatan pembangunan menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah dan efektif, mudah dipantau serta mudah diukur pencapaian hasilnya.
- b. Menetapkan indikator kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja OPD agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya sehingga dapat ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
- c. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Kabupaten Lampung Barat;

- d. Sebagai salah satu bagian dari tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun ke dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2022 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 6 program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan termasuk sub kegiatan rutin sebanyak 44 sub kegiatan. Alokasi dana tahun 2023 untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 20.415.907.930,- terealisasi sebesar Rp. 20.093.282.352,- atau 98,42 persen.

Dari seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2023 secara umum telah realisasi fisiknya mencapai 100 persen dan rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2023 adalah sebesar 98.49 persen.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja perangkat daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator–indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing–masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	85% - > 100%	Sangat Berhasil
2	70% - 85%	Berhasil
3	55 % - 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dapat terlihat dalam tableberikut ini :

Tabel A.1

Hasil Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET	REALISASI BERDASARKAN KONDISI REAL
1	Meningkatnya Fasilitas Penanganan Konflik SARA	Persentase potensi konflik SARA tidak menjadi peristiwa konflik SARA di Kabupaten Lampung Barat	Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA / Jumlah Potensi Konflik SARA x 100%	100%	100%
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat x 100%	5.26%	6.42%

Dari uraian tabel di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dapat dikategorikan “Baik”. Dengan demikian diharapkan di masa yang akan datang semua kegiatan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta tetap memperhatikan unsur-unsur efektif dan efisien.

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat masih difokuskan pada terciptanya kondusivitas wilayah yang tentram, aman dan tertib pasca pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat melalui pendidikan

politik masyarakat mengingat situasi pasca pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berpotensi menimbulkan kondisi perpecahan dilingkungan masyarakat sebagai akibat dari perbedaan pandangan politik dan perbedaan pilihan pada saat pelaksanaan pemilihan tersebut, disamping itu penguatan karakter melalui pendidikan wawasan kebangsaan dan Bela Negara sebagai mandatori kegiatan dari pemerintah pusat akan tetap dilaksanakan sehingga dapat berkontribusi positif terhadap persatuan dan kesatuan wilayah sebagai bagian dari NKRI.

Berpedoman pada isu strategis yang terurai dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Masuknya era globalisasi yang berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat.
2. Memelihara kondusivitas wilayah yang tenang, aman dan tertib pasca pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan umum Legislatif dan pemilihan umum Presiden, serta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati yang berpotensi meningkatkan suhu politik di kalangan masyarakat, Ormas/LSM dan Partai Politik sehingga rentan terjadinya konflik/benturan-benturan antar kelompok masyarakat.
3. Memelihara dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi seringkali menjurus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial.
4. Budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik masih perlu dimantapkan, sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kebebasan yang dinamik melalui momentum reformasi seakan berjalan tanpa arah, karenanya perlu di dayagunakan menjadi sumber daya kreatifitas dan sumber daya cipta yang positif, agar tetap mendukung eksistensi negara kesatuan yang demokratis dan bermuara pada tegaknya kedaulatan rakyat yang berkeadilan dan beradab.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 telah dilakukan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD. Hal tersebut dilaksanakan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang telah disusun selaras dengan Rancangan RKPD. Reviu dilaksanakan penyelarasan Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

“Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat”

Indicator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama

2. Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

➤ **Sasaran 1** : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Pengurangan Konflik SARA, target tahun 2024 sebesar 100%

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran tersebut menggunakan formulasi penghitungan yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA} \times 100\%}{\text{Jumlah Potensi Konflik SARA}}$$

➤ **Sasaran 2** : **Meningkatnya kesadaran politik masyarakat**

Dengan indicator :

- 1) Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi, target pada tahun 2025 sebesar - %.

Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi}}{\text{Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah, target tahun 2025 sebesar 5,82%

Adapun formulasi penghitungan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Ormas yang aktif}}{\text{Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat}} \times 100\%$$

Berikut Review terhadap Rancangan Awal RKPd pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25 %	3.126.067.900,-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Lampung Barat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,25 %	3.126.067.900,-	
2	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	85 %	1.925.610.000,-	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Lampung Barat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	85 %	1.925.610.000,-	
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	70 %	1.738.212.500,-	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Lampung Barat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	70 %	1.738.212.500,-	
4	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65 %	695,450.000,-	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Lampung Barat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	65 %	695,450.000,-	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71 %	1.566.950.000,-	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Lampung Barat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	71 %	1.566.950.000,-	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,960,200,000,-	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Lampung Barat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	1,960,200,000,-	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Barat. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada tingkat kecamatan diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat tidak terdapat usulan program kegiatan dari masyarakat yang masuk dan perlu tindak lanjut dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Lampung Barat dalam hal merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

Telaahan kebijakan nasional untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKPD (rancangan awal).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur keseluruhan sistem perencanaan pembangunan maka perencanaan pembangunan dituangkan dalam dokumen yang berkesinambungan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun pendek atau tahunan. Secara makro, kinerja pembangunan nasional dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu : (i) pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan kesejahteraan rakyat; (iii) pengurangan kemiskinan; (iv) pengurangan tingkat kesenjangan antar daerah; (v) peningkatan kualitas hidup rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan; (vi) perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan arah kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas SDM menuju Rakyat Lampung Berjaya dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi dan nilai tambah produk unggulan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religious, aman dan berbudaya
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dalam kaitan penetapan tujuan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berlandaskan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman dan Damai, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menetapkan tujuan perangkat daerah sebagai berikut : " Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat" dengan indikator Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sedangkan yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu tahun 2022 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Dengan target pada tahun 2025 sebesar 100%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Dengan target pada tahun 2024 sebesar - %.

2. Persentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan.

Dengan target pada tahun 2024 sebesar 5,82 %.

**Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Sangat Baik (84,5)	Sangat Baik (84,10)	Sangat Baik (84,15)	Sangat Baik (84,20)

**Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi		86%		
			Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%	5,54%	5.82%	6,09%

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 antara lain :

- PROGRAM** : **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Kegiatan : **Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :**
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM : PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 3. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 4. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.
 5. Pembentukan Paskibra

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Sub Kegiatan** : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

PROGRAM : **PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.**

- Sub Kegiatan** : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

PROGRAM : **PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

- Sub Kegiatan** : 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

PROGRAM : **PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.**

Kegiatan : **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.**

- Sub Kegiatan** : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan pada penjabarannya dilakukan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi perangkat daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah (sekda).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan ketentuan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan

dan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah yang direncanakan akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan dengan detail rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2025
1	2	3
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2025 sejumlah 16 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.09	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat

1	2	3
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2024
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol

1	2	3
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam
		Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang) Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibraan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.

1	2	3
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat - Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat..
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana hibah kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	

1	2	3
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Bahan Perumusan dilaksanakan dalam bentuk kajian akademik dan pemetaan P4GN di Lampung Barat
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta</p> <p>Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 13 Bulan</p> <p>Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Sumber Jaya, Kec. Way Tenong, Kec. Suoh, Kec. Belalau dan Kec. Sukau. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang</p> <p>Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Deradikalisasi paham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Sukau dan Kec. Lumbok Semining</p> <p>Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat</p> <p>Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.</p> <p>Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	

1	2	3
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak, Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat

4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Pendanaan Indikatif merupakan perspektif anggaran dengan strategi kesiapan input pendanaan yang bertujuan menyediakan dukungan finansial yang mencukupi dengan alat pengukur strategis.

Dana indikatif yang diperlukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 10.976.490.400,-** (*sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus rupiah*). Rencana dana indikatif tersebut dialokasikan untuk membiayai 6 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun, selain sebagai pedoman dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.


Agar Rencana Kerja ini dapat mendatangkan manfaat bagi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dioperasionalkan dan dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi dan konsisten yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Keberhasilan akan seluruh Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat hanya akan terwujud bila seluruh sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Liwa, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPD (RENSTRA) Sampai Dengan Tahun 2026 (Akhir Periode RPD)		Realisasi Capaian Kinerja RPKD (RENJA) Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD (RENJA) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD (RENJA) Yang Dievaluasi (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD (RENJA) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPD (RENSTRA) s.d. Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			
2	3	4	5		6		7		8		9 = (8/7 x 100%)		10 = (6 + 8)		11 = (10/5 x 100)		11	12	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			40,897,065,938		20,093,282,352		30,848,149,719		30,848,149,719				50,941,432,071					
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45 %	12,029,703,632	73 %	1,764,781,418	76.05 %	1,992,246,000	76.05 %	1,992,246,000	100.00	100.00	75,85 %	3,757,027,418	100.00	31.23	Badan Kesbangpol		
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	3,884,000	100.00	100.00	22 Dokumen	7,908,000	57.89	25.31	Badan Kesbangpol		
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 Dokumen	100,709,700	4 Dokumen	13,320,000	5 Dokumen	15,307,000	5 Dokumen	15,307,000	100.00	100.00	9 Dokumen	28,627,000	47.37	28.43			
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Dokumen	118,345,500	14 Dokumen	5,638,000	12 Dokumen	5,664,800	12 Dokumen	5,664,800	100.00	100.00	26 Dokumen	11,302,800	52.00	9.55			
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 Dokumen	31,243,500	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	3,884,000	100.00	100.00	22 Dokumen	7,908,000	57.89	25.31	Badan Kesbangpol		
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	30,166,500	1 Dokumen	2,321,000	1 Dokumen	3,057,000	1 Dokumen	3,057,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,378,000	50.00	17.83	Badan Kesbangpol		

8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	23,205,000	1 Dokumen	2,340,000	1 Dokumen	2,577,000	1 Dokumen	2,577,000	100.00	100.00	2 Dokumen	4,917,000	50.00	21.19	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	20,884,500	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	3,078,000	1 Dokumen	3,078,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,918,000	50.00	28.34	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	26,453,700	1 Dokumen	2,616,000	1 Dokumen	3,068,000	1 Dokumen	3,068,000	100.00	100.00	2 Dokumen	5,684,000	50.00	21.49	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	25,525,500	2 laporan	3,203,000	2 laporan	3,527,000	2 laporan	3,527,000	100.00	100.00	4 laporan	6,730,000	50.00	26.37	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan	92,820,000	12 laporan	5,638,000	12 laporan	5,664,800	12 laporan	5,664,800	100.00	100.00	24 laporan	11,302,800	50.00	12.18	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/ Bulan	8,353,800,000	14 Orang/ Bulan	1,474,631,523	14 Orang/ Bulan	1,641,969,700	14 Orang/ Bulan	1,641,969,700	100.00	100.00	28 Orang/ Bulan	3,116,601,223	50.00	37.31	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	16,243,500	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	2,542,000	100.00	100.00	2 Dokumen	4,748,000	50.00	29.23	Badan Kesbangpol

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	19,492,200	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	3,563,000	100.00	100.00	4 Dokumen	7,194,000	50.00	36.91	Badan Kesbangpol
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	37,128,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	2,494,000	100.00	100.00	4 Dokumen	6,942,000	50.00	18.70	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	8,353,800,000	14 Orang	1,474,631,523	14 Orang	1,641,969,700	14 Orang	1,641,969,700	100.00	100.00	28 Orang	3,116,601,223	50.00	37.31	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	16,243,500	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	2,542,000	100.00	100.00	2 Dokumen	4,748,000	50.00	29.23	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	19,492,200	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	3,563,000	100.00	100.00	4 Dokumen	7,194,000	50.00	36.91	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	37,128,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	2,494,000	100.00	100.00	4 Dokumen	6,942,000	50.00	18.70	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	11,234,000	100.00	100.00	2 Dokumen	20,735,000	8.33	29.62	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	11,234,000	100.00	100.00	2 Dokumen	20,735,000	8.33	29.62	Badan Kesbangpol

8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	54,541,032	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	12,872,000	100.00	100.00	2 Dokumen	23,208,000	50.00	42.55	Badan Kesbangpol
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Orang	-	-	0.00
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	54,541,032	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	12,872,000	100.00	100.00	2 Dokumen	23,208,000	50.00	42.55	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Orang	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	18,749,640	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	100.00	100.00	2 Paket	4,327,200	50.00	23.08	Badan Kesbangpol
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	116,025,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	12,210,000	100.00	100.00	4 Paket	24,880,000	50.00	21.44	Badan Kesbangpol
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	31,465,980	6 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	100.00	100.00	13 Dokumen	11,520,000	46.43	36.61	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	31,939,362	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	100.00	100.00	2 laporan	7,192,000	50.00	22.52	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	762,507,018	1 laporan	90,560,900	1 laporan	75,530,000	1 laporan	75,530,000	100.00	100.00	2 laporan	166,090,900	50.00	21.78	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	18,749,640	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	100.00	100.00	2 Paket	4,327,200	50.00	23.08	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	116,025,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	12,210,000	100.00	100.00	4 Paket	24,880,000	50.00	21.44	Badan Kesbangpol

8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28	Dokumen	31,465,980	6	Dokumen	5,760,000	7	Dokumen	5,760,000	7	Dokumen	5,760,000	100.00	100.00	13	Dokumen	11,520,000	46.43	36.61	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4	laporan	31,939,362	1	laporan	3,596,000	1	laporan	3,596,000	1	laporan	3,596,000	100.00	100.00	2	laporan	7,192,000	50.00	22.52	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	laporan	762,507,018	1	laporan	90,560,900	1	laporan	75,530,000	1	laporan	75,530,000	100.00	100.00	2	laporan	166,090,900	50.00	21.78	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	79	Unit	835,380,000	0	Unit	-	9	Unit	55,500,000	9	Unit	55,500,000	100.00	100.00	9	Unit	55,500,000	11.39	6.64	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	Unit	322,595,910		Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	0.00	-	Unit	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Unit	118,809,600		Unit		8	Unit	39,500,000	8	Unit	39,500,000	100.00	100.00	8	Unit	39,500,000	22.22	33.25	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	393,974,490		Unit		1	Unit	16,000,000	1	Unit	16,000,000	100.00	100.00	1	Unit	16,000,000	2.78	4.06	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	9,282,000	1	laporan	1,700,000	1	laporan	1,800,000	1	laporan	1,800,000	100.00	100.00	2	laporan	3,500,000	50.00	37.71	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	76,576,500	1	laporan	11,400,535	1	laporan	15,840,000	1	laporan	15,840,000	100.00	100.00	2	laporan	27,240,535	50.00	35.57	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	laporan	603,330,000	1	laporan	48,277,400	1	laporan	58,169,900	1	laporan	58,169,900	100.00	100.00	2	laporan	106,447,300	50.00	17.64	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	laporan	9,282,000	1	laporan	1,700,000	1	laporan	1,800,000	1	laporan	1,800,000	100.00	100.00	2	laporan	3,500,000	50.00	37.71	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	laporan	76,576,500	1	laporan	11,400,535	1	laporan	15,840,000	1	laporan	15,840,000	100.00	100.00	2	laporan	27,240,535	50.00	35.57	Badan Kesbangpol

8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	603,330,000	1 laporan	48,277,400	1 laporan	58,169,900	1 laporan	58,169,900	100.00	100.00	2 laporan	106,447,300	50.00	17.64	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	48 Unit	672,944,700	14 Unit	60,917,460	12 Unit	62,146,000	12 Unit	62,146,000	100.00	100.00	26 Unit	123,063,460	54.17	18.29	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	442,774,605	6 Unit	46,181,710	5 Unit	45,300,000	5 Unit	45,300,000	100.00	100.00	11 Unit	91,481,710	55.00	20.66	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	44,530,095	7 Unit	6,635,750	6 Unit	6,846,500	6 Unit	6,846,500	100.00	100.00	13 Unit	13,482,250	54.17	30.28	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	185,640,000	1 Unit	8,100,000	1 Unit	9,999,500	1 Unit	9,999,500	100.00	100.00	2 Unit	18,099,500	50.00	9.75	Badan Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	95 Persen	5,715,273,600	80 Persen	699,612,800	80 Persen	1,011,884,840	80 Persen	1,011,884,840	100.00	100.00	160 Persen	1,711,497,640	168.42	29.95	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,038,519,000	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	100 Orang	62,257,000	100.00	100.00	150 Orang	702,092,300	7.50	67.61	Badan Kesbangpol

		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1004 Orang	1,554,254,600	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	100 Orang	56,417,000	100.00	100.00	180 Orang	116,194,500	17.93	7.48		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	122,500,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	0.00	0.00	- laporan	-	-	0.00		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 Dokumen	193,897,000	100.00	100.00	1 Dokumen	193,897,000	33.33	25.85		
		Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Orang	699,313,840	100.00	100.00	50 Orang	699,313,840	33.33	31.08		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,038,519,000	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	100 Orang	62,257,000	100.00	100.00	150 Orang	702,092,300	7.50	67.61	Badan Kesbangpol	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1004 Orang	1,554,254,600	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	100 Orang	56,417,000	100.00	100.00	180 Orang	116,194,500	17.93	7.48	Badan Kesbangpol	

8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	122,500,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 Dokumen	193,897,000	100.00	100.00	1 Dokumen	193,897,000	33.33	25.85	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Orang	699,313,840	100.00	100.00	50 Orang	699,313,840	33.33	31.08	Badan Kesbangpol
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	72 Persen	7,270,588,250	69 Persen	15,648,700,519	69 Persen	23,039,839,829	69 Persen	23,039,839,829	100.00	100.00	138 Persen	38,688,540,348	191.67	532.12	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1982 Orang	1,153,725,000	212 Orang	166,949,200	213 Orang	400,000,000	213 Orang	400,000,000	100.00	100.00	425 Orang	566,949,200	21.44	49.14	Badan Kesbangpol

<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	1880 Orang	1,544,067,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	160 Orang	102,547,500	100.00	100.00	370 Orang	280,310,750	19.68	18.15	Badan Kesbangpol
<p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	22,537,292,329	100.00	100.00	20 Laporan	37,841,280,398	50.00	827.53	Badan Kesbangpol

8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1982 Orang	1,153,725,000	212 Orang	166,949,200	213 Orang	400,000,000	213 Orang	400,000,000	100.00	100.00	425 Orang	566,949,200	21.44	49.14	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1880 Orang	1,544,067,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	160 Orang	102,547,500	100.00	100.00	370 Orang	280,310,750	19.68	18.15	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	4,572,795,750	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	22,537,292,329	100.00	100.00	20 Laporan	37,841,280,398	50.00	827.53	Badan Kesbangpol

8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktiv	70 Persen	2,559,905,456	55 Persen	467,278,250	55 Persen	457,042,000	55 Persen	457,042,000	100.00	100.00	110 Persen	924,320,250	157.14	36.11	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	546,978,978	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	29,055,000	100.00	100.00	2 Dokumen	53,473,750	50.00	9.78	Badan Kesbangpol
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		540 Orang	1,644,575,478	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	60 Orang	427,987,000	100.00	100.00	176 Orang	870,846,500	32.59	52.95	Badan Kesbangpol	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		362 laporan	368,351,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	0.00	0.00	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	546,978,978	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	29,055,000	100.00	100.00	2 Dokumen	53,473,750	50.00	9.78	Badan Kesbangpol

8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,644,575,478	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	60 Orang	427,987,000	100.00	100.00	176 Orang	870,846,500	32.59	52.95	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	368,351,000	0 laporan	-	- laporan	-	- laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- laporan	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	74 Persen	6,360,095,000	71 Persen	386,762,940	71 Persen	391,255,900	71 Persen	391,255,900	100.00	100.00	142 Persen	778,018,840	191.89	12.23	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	368,351,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- Dokumen	-	-	0.00	Badan Kesbangpol

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,420,115,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	40 Orang	175,842,500	100.00	100.00	80 Orang	361,146,640	1.82	8.17	Badan Kesbangpol
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,278,018,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	160 Orang	133,103,000	100.00	100.00	190 Orang	258,833,500	9.50	20.25	Badan Kesbangpol
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	1 laporan	82,310,400	100.00	100.00	2 laporan	158,038,700	12.50	53.83	Badan Kesbangpol

8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	368,351,000	0 Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00	0.00	- Dokumen	-	-	0.00	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,420,115,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	40 Orang	175,842,500	100.00	100.00	80 Orang	361,146,640	1.82	8.17	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,278,018,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	160 Orang	133,103,000	100.00	100.00	190 Orang	258,833,500	9.50	20.25	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	293,611,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	1 laporan	82,310,400	100.00	100.00	2 laporan	158,038,700	12.50	53.83	Badan Kesbangpol

8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	6,961,500,000	100 %	1,126,146,425	100 %	3,955,881,150	100 %	3,955,881,150	100.00	100.00	100 %	5,082,027,575	100.00	73.00	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	25 Orang	22,000,000	100.00	100.00	50 Orang	43,187,550	12.50	9.31	Badan Kesbangpol
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		44 laporan	928,200,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	131,793,500	100.00	100.00	22 laporan	148,199,150	50.00	15.97	Badan Kesbangpol	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	3,802,087,650	100.00	100.00	8 Dokumen	4,890,640,875	50.00	87.82	Badan Kesbangpol	

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	464,100,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	25 Orang	22,000,000	100.00	100.00	50 Orang	43,187,550	12.50	9.31	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	928,200,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	131,793,500	100.00	100.00	22 laporan	148,199,150	50.00	15.97	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5,569,200,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	3,802,087,650	100.00	100.00	8 Dokumen	4,890,640,875	50.00	87.82	Badan Kesbangpol
				40,897,065,938		20,093,282,352		30,848,149,719		30,848,149,719			50,941,432,071				

LAMPIRAN II
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lampung Barat

esatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD/Renstra Tahun 2026		Realisasi Capaian RKPD/Renja Tahun 2023		Prakiraan Capaian Target RKPD/Renja Tahun 2024		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025						Penjelasan Ditail Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target Kinerja	Pagu Indikatif		
													Nasional	Daerah						
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			43,859,815,760		20,093,282,352		30,848,149,719		10,976,490,400							15,180,707,170			
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45 %	12,181,258,410	73 %	1,764,781,418	76.05 %	1,992,246,000	76.25 %	3,126,067,900							76,45 %	3,455,473,820	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41 Dokumen	31,962,000	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	4,235,000							8 Dokumen	19,568,500	Badan Kesbangpol	
		Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	19 Dokumen	108,170,800	4 Dokumen	10,117,000	4 Dokumen	11,780,000	4 Dokumen	21,356,000								5 Dokumen	28,802,700	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50 Dokumen	111,415,500	14 Dokumen	8,841,000	14 Dokumen	9,191,800	14 Dokumen	30,855,000								12 Dokumen	33,940,500	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41 Dokumen	31,962,000	11 Dokumen	4,024,000	11 Dokumen	3,884,000	11 Dokumen	4,235,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026		8 Dokumen	19,568,500	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	31,668,000	1 Dokumen	2,321,000	1 Dokumen	3,057,000	1 Dokumen	7,865,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026		1 Dokumen	8,651,500	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	24,360,000	1 Dokumen	2,340,000	1 Dokumen	2,577,000	1 Dokumen	6,050,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025		1 Dokumen	6,655,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	11,551,900	1 Dokumen	2,840,000	1 Dokumen	3,078,000	1 Dokumen	544,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026		1 Dokumen	5,909,500	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokume Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	27,770,400	1 Dokumen	2,616,000	1 Dokumen	3,068,000	1 Dokumen	6,897,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025		1 Dokumen	7,586,700	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 laporan	26,796,000	2 laporan	3,203,000	2 laporan	3,527,000	2 laporan	6,655,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025		2 laporan	7,320,500	Badan Kesbangpol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48 laporan	97,440,000	12 laporan	5,638,000	12 laporan	5,664,800	12 laporan	24,200,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025	12 laporan	26,620,000	Badan Kesbangpol		
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan	8,353,800,000	14 Orang/ Bulan	1,474,631,523	14 Orang/ Bulan	1,641,969,700	16 Orang/ Bulan	2,178,000,000						14 Orang/ Bulan	2,395,800,000	Badan Kesbangpol		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	17,052,000	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	4,235,000							1 Dokumen	4,658,500	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	20,462,400	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	5,082,000								2 Dokumen	5,590,200	Badan Kesbangpol
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	38,976,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	9,680,000								2 Dokumen	10,648,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	8,353,800,000	14 Orang	1,474,631,523	14 Orang	1,641,969,700	16 Orang	2,178,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2026 sejumlah 16 orang		14 Orang	2,395,800,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen	17,052,000	1 Dokumen	2,206,000	1 Dokumen	2,542,000	1 Dokumen	4,235,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025		1 Dokumen	4,658,500	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	8 Dokumen	20,462,400	2 Dokumen	3,631,000	2 Dokumen	3,563,000	2 Dokumen	5,082,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025		2 Dokumen	5,590,200	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	38,976,000	2 Dokumen	4,448,000	2 Dokumen	2,494,000	2 Dokumen	9,680,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025		2 Dokumen	10,648,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	58,190,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	15,000,000							1 Dokumen	16,500,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	58,190,000	1 Dokumen	9,501,000	1 Dokumen	11,234,000	1 Dokumen	15,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengadministrasian dalam rangka pengelolaan dan penyusunan kebutuhan barang milik daerah yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat		1 Dokumen	16,500,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	55,833,710	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	14,219,900							1 Dokumen	14,219,920	Badan Kesbangpol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	6 Orang	20,000,000					6 Orang	20,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	55,833,710	1 Dokumen	10,336,000	1 Dokumen	12,872,000	1 Dokumen	14,219,900	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat	1 Dokumen	14,219,920	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsinya	24 Orang	70,000,000	0 Orang	-	- Orang	-	6 Orang	20,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol	6 Orang	20,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	19,682,880	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	4,888,400					1 Paket	5,377,240	Badan Kesbangpol
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	121,800,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	30,250,000					2 Paket	33,275,000	Badan Kesbangpol
		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	33,032,160	6 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	8,203,800					7 Dokumen	9,024,180	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	33,529,104	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	1 laporan	8,327,220					1 laporan	9,159,942	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	800,459,856	1 laporan	90,560,900	1 laporan	75,530,000	1 laporan	198,800,580					1 laporan	218,680,638	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	4 Paket	19,682,880	1 Paket	2,163,600	1 Paket	2,163,600	1 Paket	4,888,400	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	1 Paket	5,377,240	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	8 Paket	121,800,000	2 Paket	12,670,000	2 Paket	12,210,000	2 Paket	30,250,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	2 Paket	33,275,000	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	28 Dokumen	33,032,160	6 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	5,760,000	7 Dokumen	8,203,800	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025	7 Dokumen	9,024,180	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	33,529,104	1 laporan	3,596,000	1 laporan	3,596,000	1 laporan	8,327,220	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2025	1 laporan	9,159,942	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	800,459,856	1 laporan	90,560,900	1 laporan	75,530,000	1 laporan	198,800,580	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025	1 laporan	218,680,638	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	79 Unit	876,960,000	0 Unit	-	9 Unit	55,500,000	22 Unit	217,800,000					22 Unit	239,580,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	338,652,720	0 Unit	-	-	Unit	-	2 Unit	84,107,100	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit	2 Unit	92,517,810	Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36 Unit	124,723,200	0 Unit	-	8 Unit	39,500,000	10 Unit	30,976,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol	10 Unit	34,073,600	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	413,584,080	0 Unit	-	1 Unit	16,000,000	10 Unit	102,716,900	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol	10 Unit	112,988,590	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	9,744,000	1 laporan	1,700,000	1 laporan	1,800,000	1 laporan	2,420,000					1 laporan	2,662,000	Badan Kesbangpol		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	80,388,000	1 laporan	11,400,535	1 laporan	15,840,000	1 laporan	19,965,000					1 laporan	21,961,500			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	633,360,000	1 laporan	48,277,400	1 laporan	58,169,900	1 laporan	157,300,000					1 laporan	173,030,000			
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	9,744,000	1 laporan	1,700,000	1 laporan	1,800,000	1 laporan	2,420,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan materi dan jasa pengiriman/ ekspedisi	1 laporan	2,662,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	80,388,000	1 laporan	11,400,535	1 laporan	15,840,000	1 laporan	19,965,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol	1 laporan	21,961,500	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	633,360,000	1 laporan	48,277,400	1 laporan	58,169,900	1 laporan	157,300,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol	1 laporan	173,030,000	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	48 Unit	706,440,000	Unit	60,917,460	12 Unit	62,146,000	12 Unit	175,450,000					12 Unit	192,995,000	Badan Kesbangpol		
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	464,813,160	6 Unit	46,181,710	5 Unit	45,300,000	5 Unit	115,440,050	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2025	5 Unit	126,984,055	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	46,746,840	7 Unit	6,635,750	6 Unit	6,846,500	6 Unit	11,609,950	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol	6 Unit	12,770,945	Badan Kesbangpol	
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	194,880,000	1 Unit	8,100,000	1 Unit	9,999,500	1 Unit	48,400,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol	1 Unit	53,240,000	Badan Kesbangpol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	95 Persen	4,948,923,600	75 Persen	699,612,800	80 Persen	1,011,884,840	85 Persen	1,925,610,000					95 Persen	2,211,897,600	Badan Kesbangpol	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,078,103,600	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	500 Orang	277,816,000					500 Orang	305,897,600	Badan Kesbangpol	
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1004 Orang	1,495,820,000	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	251 Orang	317,794,000						251 Orang	436,000,000		
Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		16 laporan	125,000,000	0 laporan	-	- laporan	-	4 laporan	30,000,000						4 laporan	40,000,000		
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 laporan	300,000,000						4 laporan	330,000,000		
		Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Dokumen	1,000,000,000					1 Dokumen	1,100,000,000		
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	1,078,103,600	50 Orang	639,835,300	100 Orang	62,257,000	500 Orang	277,816,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam	500 Orang	305,897,600	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Pembinaan dan Pemantapan ideologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung					
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1004 Orang	1.495,820,000	80 Orang	59,777,500	100 Orang	56,417,000	251 Orang	317,794,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)</p> <p>Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit</p> <p>Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit</p>		251 Orang	436,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 laporan	125,000,000	0 laporan	-	- laporan	-	4 laporan	30,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>		4 laporan	40,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Dokumen	750,000,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	193,897,000	1 Dokumen	300,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	<p>Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibrakaan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran</p>		1 Dokumen	330,000,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibra	150 Orang	2,250,000,000	0 Orang	-	50 Orang	699,313,840	50 Orang	1,000,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.		50 Orang	1,100,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	72 Persen	10,058,928,750	68 Persen	15,648,700,519	69 Persen	23,039,839,829	70 Persen	1,738,212,500						72 Persen	5,067,795,750	Badan Kesbangpol	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	991 Orang	353,725,000	212 Orang	166,949,200	213 Orang	400,000,000	- Orang	-						0 Orang	-	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1430 Orang	1,654,808,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	250 Orang	450,000,000						250 Orang	495,000,000	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	8,050,395,250	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	1,288,212,500						10 Laporan	4,572,795,750	Badan Kesbangpol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	991 Orang	353,725,000	212 Orang	166,949,200	213 Orang	400,000,000	- Orang	-	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				0 Orang	-	Badan Kesbangpol	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1430 Orang	1,654,808,500	210 Orang	177,763,250	160 Orang	102,547,500	250 Orang	450,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat				250 Orang	495,000,000	Badan Kesbangpol
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Laporan	8,050,395,250	10 Laporan	15,303,988,069	10 Laporan	22,537,292,329	10 Laporan	1,288,212,500	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kegiatan berupa pemberian dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hiabah kepada lembaga penyelenggara/ pengawas pemilu/pilkada			10 Laporan	4,572,795,750	Badan Kesbangpol	
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	70 Persen	2,655,240,000	50 Persen	467,278,250	55 Persen	457,042,000	60 Persen	659,450,000						70 Persen	725,395,000	Badan Kesbangpol	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	574,204,176	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	142,608,180						1 Dokumen	156,868,998	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,726,432,176	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	135 Orang	428,773,180						135 Orang	471,650,498	Badan Kesbangpol	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	354,603,648	0 laporan	-	- laporan	-	90 laporan	88,068,640					92 laporan	96,875,504	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	574,204,176	1 Dokumen	24,418,750	1 Dokumen	29,055,000	1 Dokumen	142,608,180	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	156,868,998	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	540 Orang	1,726,432,176	116 Orang	442,859,500	60 Orang	427,987,000	135 Orang	428,773,180	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			135 Orang	471,650,498	Badan Kesbangpol
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	362 laporan	354,603,648	0 laporan	-	- laporan	-	90 laporan	88,068,640	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			92 laporan	96,875,504	Badan Kesbangpol
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	74 Persen	6,402,545,000	70 Persen	386,762,940	71 Persen	391,255,900	72 Persen	1,566,950,000					74 Persen	1,723,645,000	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	258,351,000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-					0 Dokumen	-	Badan Kesbangpol
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,524,865,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	1,100 Orang	1,152,250,000					1100 Orang	1,267,475,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,317,818,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	500 Orang	337,800,000					500 Orang	371,580,000	Badan Kesbangpol
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	301,511,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	4 laporan	76,900,000					4 laporan	84,590,000	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	258,351,000	- Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				Dokumen	Badan Kesbangpol
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4400 Orang	4,524,865,000	40 Orang	185,304,140	40 Orang	175,842,500	1100 Orang	1,152,250,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		<p>Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta</p> <p>Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkoba) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 14 Bulan</p>	1100 Orang	1,267,475,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Gedung Surian, Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Brak, Kec. Air Hitam, dan Kec. Batu Ketulis. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang					
												Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat					
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2000 Orang	1,317,818,000	30 Orang	125,730,500	160 Orang	133,103,000	500 Orang	337,800,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Deradikalisasi faham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Gedung Surian dan Kec. Kebun Tebu		500 Orang	371,580,000	Badan Kesbangpol
												Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat					
												Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.					
												Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat					
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	16 laporan	301,511,000	1 laporan	75,728,300	1 laporan	82,310,400	4 laporan	76,900,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4 laporan	84,590,000	Badan Kesbangpol
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	100 %	7,612,920,000	100 %	1,126,146,425	100 %	3,955,881,150	100 %	1,960,200,000					100 %	1,996,500,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	487,200,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	100 Orang	121,000,000					100 Orang	133,100,000	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	974,400,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	242,000,000					11 laporan	266,200,000	Badan Kesbangpol	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	6,151,320,000	4 Dokumen	1,088,553,225	4 Dokumen	3,802,087,650	4 Dokumen	1,597,200,000					4 Dokumen	1,597,200,000	Badan Kesbangpol	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	400 Orang	487,200,000	25 Orang	21,187,550	25 Orang	22,000,000	100 Orang	121,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak, Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa		100 Orang	133,100,000	Badan Kesbangpol
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44 laporan	974,400,000	11 laporan	16,405,650	11 laporan	131,793,500	11 laporan	242,000,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat		11 laporan	266,200,000	Badan Kesbangpol

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen 6,151,320,000	4 Dokumen 1,088,553,225	4 Dokumen 3,802,087,650	4 Dokumen 1,597,200,000	Liwa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh usur Fokompinda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat		4 Dokumen 1,597,200,000		Badan Kesbangpol
			43,859,815,760	20,093,282,352	30,848,149,719	10,976,490,400									15,180,707,170	

LAMPIRAN III
DETAIL SUB KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	DETAIL KHUSUS SUBKEGIATAN TAHUN 2025
1	2	5
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, Renja Tahun 2026
8.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025
8.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2026
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025
8.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Evaluasi kinerja perangkat daerah Tahun 2025
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Tahun 2025 sejumlah 14 orang
8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi bagi Pegawai Badan Kesbangpol
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan SKHU kantor Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu Kantor Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan anggaran untuk Perjalanan Dinas baik luar daerah maupun didalam daerah Tahun 2025
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas untuk operasional Badan Kesbangpol target sebanyak 2 unit
8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel untuk perlengkapan kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin untuk menunjang kegiatan operasional Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi

1	2	5
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai dan jasa pengiriman/ekspedisi
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Badan Kesbangpol Tahun 2025
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya kantor Badan Kesbangpol
8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara i dilakukan terhadap 230 Orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda, Mahasiswa, Ormas Penggiat Pembangunan Pekon, Kader Pekon, di empat Kecamatan yaitu Kec. Lumbok, Way Tenong, Kebun Tebu, Air Hitam
		Pembinaan dan Pemantapan idiologi pancasila dilakukan terhadap 270 orang peserta utusan Aparatur Pemerintah pusat/daerah, Aparatur Pekon, Tokoh Masyarakat, Organisasi Wanita, Organisasi Kemasyarakatan, pemuda, mahasiswa, Ormas penggiat pembangunan pekon, Kader pekon, di empat kecamatan yaitu : Air Hitam, BNS, Suoh, Lumbok Seminung
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelatihan bela negara dilakukan 1 kali dalam satu tahun dengan peserta sebanyak satu pleton (31 orang)
		Sosialisasi dilakukan terhadap 100 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan Balik Bukit
		Diklat Diklat TOT dilakukan terhadap 120 Orang peserta yang terdiri atas Tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, aktivis gender, Guru, pemuda, pelajar/mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari di Kecamatan Balik Bukit
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhadap seluruh kegiatan dan sub kegiatan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa dan Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8.01.02.2.01.07	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait kepaskibrakaan ke sekolah tingkat SLTA serta pembinaan kepada para purnapaskibra Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran
8.01.02.2.01.08	Pembentukan Paskibraka	Kegiatan ini merupakan seleksi dan pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten Lampung Barat dan seleksi peserta untuk ikut seleksi anggota paskibra tingkat Provinsi dan tingkat pusat serta penyediaan perlengkapan untuk pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada saat peringatan HUT kemerdekaan RI.
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	

1	2	5
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	<p>- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik pada pengurus partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat</p> <p>- Melaksanakan kegiatan sosialisasi undang-undang politik di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Barat..</p>
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kegiatan berupa pemberian dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mempunyai wakil/kursi di DPRD Lampung Barat dan Hibah kepada lembaga penyelenggara/pengawas pemilu/pilkada
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
8.01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyusunan buku data base bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM yang berada di Kabupaten Lampung Barat dan pemberian dana hibah kepada LSM/Ormas yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kegiatan berupa monitoring dan evaluasi kepada Ormas/LSM/Masjid/Lembaga Pendidikan Swasta yang telah memiliki Surat Tanda Lapor Keberadaan di Kabupaten Lampung Barat
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Pameran produk unggulan dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi TMII Jakarta</p> <p>Promosi Budaya dilakukan dalam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pagelaran seni dan budaya alam rangka Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII, pameran ini dilaksanakan 1 kali dalam setahun yang berlokasi di anjungan Lampung TMII Jakarta</p> <p>Pembinaan Desa Bersinar (Desa bersih Narkotika) dilakukan terhadap 1 Pekon yang ditunjuk di Lampung Barat, dan 30 Kader P4GN Pekon yang ditunjuk. Pembinaan Desa Bersinar dilakukan selama 14 Bulan</p> <p>Sosialisasi Bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sebanyak 5 kali yaitu : di Kec. Gedung Surian, Kec. Pagar Dewa, Kec. Batu Brak, Kec. Air Hitam, dan Kec. Batu Ketulis. Peserta sosialisasi sebanyak 500 Orang</p> <p>Deteksi dini penyalahgunaan narkotika (Tes Urine) dilaksanakan sekali dalam setahun dengan sasaran 600 ASN Pemda Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	<p>Deradikalisasi paham radikalisme dilakukan terhadap 20 orang yang terindikasi terpapar pemahaman radikalisme, Deradikalisasi dilakukan selama satu tahun anggaran, di dua Kecamatan yaitu Kec. Gedung Surian dan Kec. Kebun Tebu</p> <p>Sasaran pembinaan dilakukan secara bertahap terhadap 15 Pondok Pesantren diseluruh Kecamatan se Lampung Barat</p>

1	2	5
		<p>Rakor FKUB dilakukan sebanyak 3 kali, di Kec. Balik Bukit dengan peserta seluruh pengurus FKUB.</p> <p>Silaturahmi Lintas Agama dilaksanakan di Kecamatan Balik Bukit dengan sasaran 200 Orang utusan dari seluruh lima agama yang dianut penduduk Lampung Barat</p>
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kegiatan ini merupakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kewaspadaan dini kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di wilayah Kecamatan Batu Brak, Sekincau, Batu Ketulis dan Pagar Dewa
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemantauan wilayah di Kabupaten Lampung Barat dalam rangka kewaspadaan dini dan penanganan konflik dengan berkoordinasi bersama Badan Intelijen Daerah, Intelijen Kejari Liwa, Intelijen Kodim 0422/Lampung Barat dan Intelijen Polres Lampung Barat
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Rapat Koordinasi seluruh unsur Fokompimda Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan per triwulan dan pemberian dana Hibah kepada instansi pemerintah pusat yang meliputi : Polda Lampung, Kodim 0422/LB, Polres LB, Kejari Liwa, Pengadilan Agama Lampung Barat